

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap AKP migran asal Jawa Tengah tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas persoalan struktural yang melingkupinya. Praktik eksploitasi yang dialami AKP bukan hanya disebabkan oleh tindakan individu atau pelaku tertentu, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya tata kelola migrasi tenaga kerja, tumpang tindih regulasi, serta keterbatasan akses pekerja terhadap informasi dan mekanisme perlindungan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif perlindungan yang telah tersedia dengan implementasinya di lapangan.

Dalam konteks tersebut, kehadiran aktor non-negara menjadi penting dalam mengisi celah perlindungan yang belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh negara. Melalui edukasi, advokasi, dan pendampingan, aktor non-negara berperan dalam meningkatkan kesadaran pekerja terhadap hak-haknya serta membuka akses terhadap perlindungan yang lebih luas. Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa proses ini masih berada pada tahap awal, di mana peningkatan kesadaran belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan struktural yang signifikan.

Lebih jauh, upaya pencegahan yang dilakukan cenderung masih berfokus pada penguatan kapasitas individu, sementara faktor-faktor struktural seperti tekanan ekonomi, sistem perekrutan yang tidak transparan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga masih menjadi penghambat utama. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat parsial belum cukup untuk menciptakan perlindungan yang menyeluruh.

Dengan demikian, dalam perspektif emansipasi keamanan, perlindungan terhadap AKP migran dapat dipahami sebagai proses yang bersifat bertahap dan belum selesai. Keamanan yang dihasilkan masih bersifat terbatas, sehingga belum sepenuhnya mampu membebaskan pekerja dari kondisi kerentanan yang mereka

hadapi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mendorong perubahan yang tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi juga pada struktur yang melatarbelakanginya.

## **4.2 Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat perlindungan terhadap AKP migran di masa mendatang.

Pertama, pemerintah perlu melakukan penguatan tata kelola migrasi tenaga kerja melalui harmonisasi regulasi dan kejelasan pembagian kewenangan antar lembaga. Tumpang tindih regulasi yang terjadi selama ini tidak hanya menimbulkan kebingungan prosedural, tetapi juga membuka ruang bagi praktik penempatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penyederhanaan dan sinkronisasi kebijakan menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan.

Kedua, peningkatan literasi hukum dan akses informasi bagi AKP migran perlu menjadi prioritas utama. Upaya edukasi tidak hanya perlu diperluas dari segi jangkauan, tetapi juga diperkuat dari segi kualitas agar mampu membangun pemahaman yang lebih kritis di kalangan pekerja. Dalam hal ini, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan komunitas pekerja migran menjadi penting sebagai pihak yang lebih dekat dengan kondisi di lapangan.

Ketiga, penguatan kolaborasi lintas aktor perlu terus didorong sebagai pendekatan utama dalam menghadapi kompleksitas permasalahan. Kerja sama antara pemerintah, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas pekerja migran perlu diformalkan dalam mekanisme yang lebih terstruktur agar tidak berjalan secara parsial. Kolaborasi yang efektif dapat membantu mengintegrasikan berbagai upaya perlindungan yang selama ini masih terfragmentasi.

Keempat, upaya perlindungan perlu diarahkan tidak hanya pada pencegahan eksploitasi, tetapi juga pada perubahan kondisi struktural yang menjadi akar permasalahan. Hal ini mencakup perbaikan sistem perekrutan, penguatan pengawasan terhadap perusahaan penyalur, serta penciptaan alternatif ekonomi yang lebih layak bagi masyarakat di daerah asal pekerja migran. Dengan demikian, perlindungan terhadap AKP migran tidak hanya membutuhkan intervensi jangka pendek, tetapi juga komitmen jangka panjang untuk menciptakan sistem yang lebih adil, inklusif, dan mampu menjamin keamanan pekerja secara menyeluruh.